

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kinerja Keuangan Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih dilihat dari Rasio Kemandirian dilihat dari hasil rata - rata sebesar 27% bahwa tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria rendah. Kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, terlihat dari rata - rata sebesar 20% berada pada kriteria kurang. Namun, kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Efektivitas dan efisiensi terlihat dari rata - rata Rasio Efektivitas sebesar 111% dan angka rata-rata Rasio Efisiensi sebesar 6,41% dikatakan sangat efektif dan sangat efisien. Kinerja keuangan diukur menggunakan Rasio Keserasian Belanja menunjukkan rata - rata rasio belanja tidak langsung sebesar 59% dan belanja langsung sebesar 41%, ini menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang karena belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.

5.2. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih, karena mempunyai dampak yang besar tidak hanya bagi Pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat. Potensi tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan.

2. Dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif, keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, dan Daerah agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria Nabila Muhibtari. (2014). *“Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah- Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, Fadel (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mulyadi, (1997). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. (Edisi kedua). Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Nordiawan, Deddi. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pedoman Skripsi – *Program Studi Akuntansi*
- Pemendagri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemendagri No. 29 Tahun 2012 *Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

Republik Indonesia. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum No. 219 PB.5.2013.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Desa.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.*

Ulum, Ihyaul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.*

Widjaja,HAW. 2005. *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN